

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis:Kepailitan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002).
- Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Badruzaman , Mariam Darius, *Kompilasi Hukum Jaminan*,(Bandung:Mandar Maju,2004).
- Boedi Harsono dan Sudarianto Wiriodarsono, *Konsepsi Pemikiran tentang UUHT₂*, (Bandung : Makalah Seminar Nasional, 27 Mei 1996).
- Fuady, Munir, *Hukum Pailit 1998, Dalam Teori dan Praktek* (Bandung: PT. CitraAditya Bakti, 2002)
- Hadikusuma, Hilman, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995).
- Harahap, M. Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Harsono , Boedi, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya Jilid I*,(Jakarta : PT Penerbit Djambatan,2008.
- _____ , *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*,(Jakarta: PT Penerbit Djambatan, 2002).
- Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*,, (Jakarta: Gramedia, 1997)
- Malikhatun, Siti, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

- Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, (Semarang:2008)
- Rasaid, M.Nur, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).
- Satrio, J, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku I*, (Bandung: Citra Adhiya Bakti, 1997)
- Shubhan , M.Hadi, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*,(Jakarta: Kencana, 2008)
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan memahami Failissements Veroderning Juncto Undang-Undang Nomr 4 Tahun 1998*,(Jakarta: Grafiti, 2002).
- Sunggono, Bambang, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).
- Usman, Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- _____ , *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004).

B. Jurnal Hukum/ Makalah

- Belinda, *Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Debitor Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan*, Tesis Kenotariatan (Sumatra: USU,2009).
- Ishak, *Upaya Hukum Debitor Pailit Terhadap Putusan Pailit*, Kanal Jurnal Ilmu Hukum Nomor.65 Tahun XVII , April 2015, (Aceh: Unsyiah Kuala, 2015).
- Jamalah, Juditia, *Akibat Hukum Putusan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Lex Crimen Volume VI, Nomor 2, Mar-Apr 2017, Unsrat, 2017.
- Malikhatun, Siti, dkk, *Kewenangan Kreditor Separatis terhadap Eksekusi HT Apabila Debitor Pailit*, Diponegoro Law Review Vol.3 No.2 (Semarang: Universitas Diponegoro, 2014).

Sonata, Depri, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8, Nomor 1, Januari-Maret 2014.

Sularto, *Perlindungan Hukum Kreditur Separatis Dalam Kepailitan*, Mimbar Hukum Volume 24, Nomor 2, Juni 2012, (UGM:2012).

Tejaningsih, Titi, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan dan Ppemberesan Harta Pailit*, disertasi doktor (Yogyakarta: UII, 2016).

Wijayanta, Tata, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum Volume 14, Nomor 2 Mei 2014, Unsoed, 2014.

C. Website/Internet

www.djkn.kemenkeu.go.id, *Lelang Berdasarkan Pasal 6 UUHT dan Lelang Berdasarkan Title Eksekutorial*, diunduh pada 14 Februari 2019

www.hukumonline.com, *Kepastian Hukum Bagi Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan*, diunduh pada 31 Januari 2019

D. Wawancara

Bernardo Da Cruz, Balai Harta Peninggalan Semarang, 30 Januari dan 6 Febuari 2019

E. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria

Undang undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda Benda yang Berkaitan dengan Tanah

Undang undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Lelang